

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam dan memiliki ketergantungan yang sangat erat berkaitan dengan manusia dan menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hutan memiliki peranan penting dalam berkembangnya kehidupan masyarakat lokal, maka keberadaan hutan perlu dipertahankan secara optimal, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu: berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Gangguan terhadap kawasan hutan umumnya terjadi karena aktivitas manusia, seperti penebangan liar, penggembalaan, ekspansi pertanian, pembuatan jalan, dan perluasan pemukiman (Garnadi, 2004).

Provinsi Jambi mempunyai daerah hutan seluas \pm 2.179.440 hektar yang terdiri dari fungsi kawasan Cagar Alam 7.598,94 ha, Taman Nasional 608.630 ha, Taman Hutan Raya 36.660 ha, Hutan Wisata Alam 430 ha, Hutan Lindung 191.130 ha, Hutan Produksi Terbatas 340.700 ha, dan Hutan Produksi Tetap 971.490 ha. Cagar Alam ialah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tanaman serta/atau keanekaragaman tanaman bersama gejala alam serta ekosistemnya yang memerlukan upaya proteksi serta pelestarian supaya eksistensi dan perkembangannya bisa berlangsung secara alami (RPJP Cagar Alam Durian Luncuk I dan II, 2016).

Pemanfaatan hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: manfaat *tangible* dan manfaat *intangibile*. Manfaat *tangible* merupakan manfaat yang diperoleh dari sumberdaya alam berbentuk material yang dipungut dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat seperti kayu, getah, rotan, buah- buahan, kulit dan lain sebagainya. Manfaat *intangibile* merupakan manfaat yang diperoleh dari sumberdaya alam tetapi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti rekreasi, hidrologi, pendidikan, penelitian, pengaturan iklim dan sebagainya.

Pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat Desa hutan terhadap hutannya mencakup berbagai kehidupan, berupa ketergantungan ekonomi, kawasan baru untuk kebutuhan protein, areal perladangan dan perkebunan, bahan bangunan, dan fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan sosial tradisional di masyarakat (Gunggung Senoaji, 2008).

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan serta memanfaatkan sumberdaya hutan adalah suatu realita yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Kegagalan pengelolaan hutan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh faktor teknis semata, namun lebih disebabkan oleh faktor sosial.

Masyarakat desa sekitar hutan merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak terlepas dari aktivitas dinamika budaya yang berlangsung terus menerus terjadi (Kristin *et al.*, 2018). Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan Pembangunan dan sumberdaya alam. Di Indonesia banyak daerah yang bergantung pada sumberdaya hutan, kesejahteraan masyarakat lokalnya juga sering kali terkait erat dengan pengelolaan hutan dan akses tentang sumberdaya alam (Haryani & Rijanti, 2019). Kesejahteraan ini mencakup beberapa aspek yakni ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan sosial. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat juga melestarikan lingkungan.

Tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan di Indonesia masih tergolong rendah dan masuk dalam indikator tahap kemiskinan. Hampir 25.383 desa di Indonesia berada di sekitar kawasan hutan (23,81% dari seluruh desa di Indonesia) terdapat 48,8 juta jiwa dan 10,2 juta diantaranya tergolong kategori miskin. Dari total penduduk Indonesia 36,73% dan 6 juta sumber penghasilannya langsung pada sumber daya hutan 3,4 juta diantaranya pada sektor kehutanan (BPS 2018). Provinsi jambi memiliki 915 desa sekitar dan dalam kawasan hutan 152.030 jiwa masyarakat berada garis kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau

pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Analisis tren garis kemiskinan pada periode Maret 2022 dan Maret 2023 bisa menggambarkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi selama setahun terakhir. Selama periode Maret 2022–Maret 2023, garis kemiskinan Jambi mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara umum, garis kemiskinan meningkat dari Rp545.870,- perkapita per bulan pada Maret 2022, menjadi Rp599.688,- perkapita per bulan pada Maret 2023 (naik 9,86 persen). Sementara itu, di wilayah perkotaan naik sebesar 9,98 persen, dan 9,71 persen di wilayah perdesaan.

Garis kemiskinan bervariasi antar kabupaten/kota, hal ini menandakan bahwa standar kemiskinan itu berbeda antar wilayah. Kota Jambi adalah kabupaten/kota yang memiliki garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp. 757.014,- sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai garis kemiskinan yang terendah yaitu Rp 575.337,- (kondisi, 2024). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
Provinsi Jambi	650.115
Kerinci	606.095
Merangin	617.011
Sarolangun	607.306
Batanghari	613.093
Muaro Jambi	617.948
Tanjung Jabung Timur	592.432
Tanjung Jabung Barat	575.337
Tebo	590.573
Bungo	607.714
Kota Jambi	757.014
Kota Sungai Penuh	610.141

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sekelompok anggota masyarakat pedesaan dikatakan berada dibawah garis kemiskinan bila pendapatan kelompok anggota masyarakat pedesaan ini tidak

cukup untuk memenuhi hidup yang pokok seperti sandang, papan serta pangan. Faktor yang saling berkaitan kemiskinan seperti, tingkat pendapatan, akses pendidikan, akses terhadap barang dan jasa. sementara secara mayoritas masyarakat pedesaan kebanyakan hidup bergantung sektor agraris (pertanian) (Eka Wanda Saputri, 2020).

Masyarakat sekitar hutan selain berada dibawah garis kemiskinan, pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (Suyanto dan Khususiyah, 2006; Dewi, 2017). Tingkat pendidikan yang rendah akan memengaruhi pemahaman atau daya tangkap terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah sebagai upaya peningkatan kapasitas. Petani berpendidikan tinggi pada umumnya mempunyai kompetensi yang baik dalam merencanakan kegiatan pertanian (Manyamsari dan Mujiburrahmad, 2014). Pendidikan adalah bagian yang dinilai paling penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan menunjukkan tingkat pengetahuan, wawasan, pola pikir dan perilaku seseorang. Tingkat Pendidikan formal yang dimiliki petani memberikan gambaran sumberdaya manusia petani pada aspek formal. Pada masa sekarang lama seseorang berpendidikan menjadi suatu indikator dalam menentukan Sejahtera atau tidak Sejahtera suatu individu (Peniarti *et al.*, 2018). Hal ini antara lain mendasari pihak pemberi bantuan cenderung memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas pada masyarakat dengan kriteria petani maju berpendidikan tinggi. Akhirnya terjadi ketimpangan pengetahuan antara petani dalam satu daerah, bahkan dalam satu kelompok tani. Hal ini secara tidak langsung, berimbas pada kecenderungan timbulnya kesenjangan sosial. Petani maju semakin maju, sementara petani miskin kurang mendapatkan manfaat dari program dan bantuan yang diberikan. Kecenderungan ini juga terjadi di era sebelumnya akibat penanggungjawab program ingin programnya lebih berhasil, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan petani-petani yang sudah terampil dan meminggirkan petani miskin (Peluso, 2006).

Salah satu Cagar Alam yang ada pada Provinsi Jambi adalah Cagar Alam Durian Luncuk I dengan luas 73,74 ha (SK Menhut No. 820/Kpts-II/1997) dan Durian Luncuk II dengan luas 41,37 ha (SK Menhut No. 821/Kpts-II/1997). Cagar Alam Durian Luncuk I dan II adalah Cagar Alam yang memiliki kekhasan/keunikan

jenis tanaman yaitu sebagai habitat pohon Bulian/ulin/borneo ironwood (*Eusideroxylon zageri Teijsm & Binn*). Pohon bulian merupakan salah satu kayu bangunan yang penting di Indonesia bernilai ekonomis tinggi dan termasuk karakteristik fisik istimewa dengan kelas kekuatan dan ketahanan nomor satu, sehingga pohon bulian menjadi incaran eksploitasi, illegal logging, perambahan habitat sehingga semakin lama semakin langka.

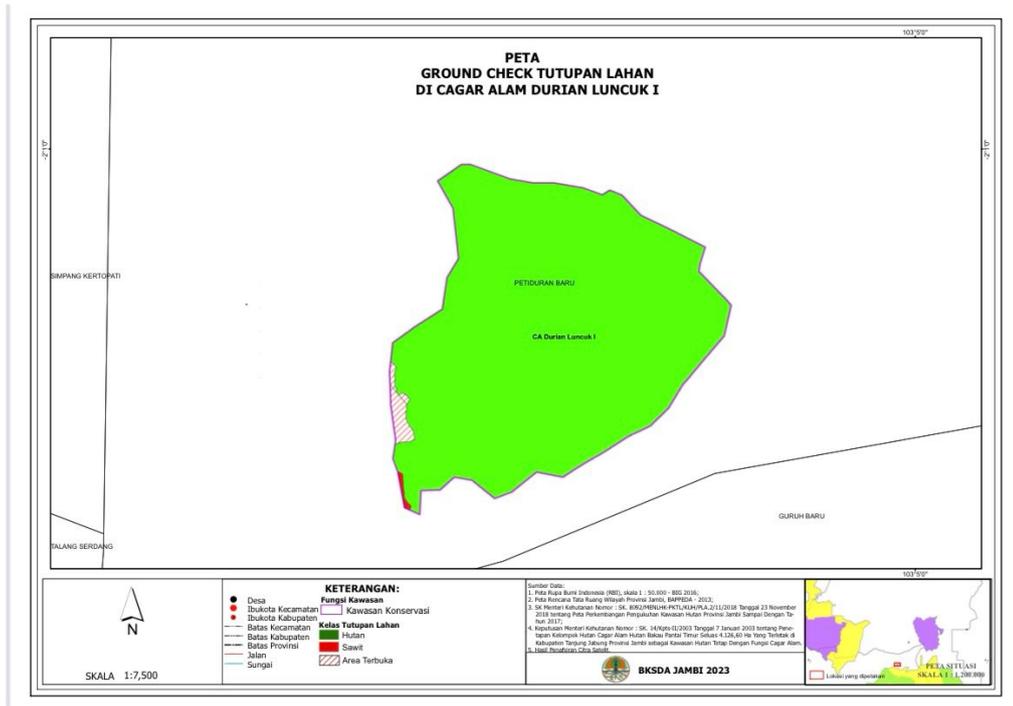
Cagar Alam Durian Luncuk I berada di Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sedangkan Sebagian besar mata pencarian penduduk pada wilayah Kecamatan Mandiangin Timur adalah dibidang pertanian, khususnya perkebunan karet masyarakat, perkebunan kelapa sawit dan pertanian padi palawija. Cagar Alam Durian Luncuk II berada di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sebagian besar penduduk bermata pencaharian utama menjadi petani/kebun karet yang berasal dari transmigran suku jawa tahun 1981 dan sebagian kecil dari transmigrasi lokal. Selain itu mata pencaharian lainnya menjadi pedagang, beternak, penjahit dan pengrajin (tukang kayu, bangunan, pembuat kerupuk, pegawai negeri sipil, dan lainnya). Masyarakat Desa Guruh Baru dan Desa Jangga Baru menggunakan lahan mereka sebagian besar untuk perkebunan karet, dan sebagian lainnya terbagi untuk penggunaan lahan pekarangan, lahan pangan, tanah kas desa, lahan pengembangan, lahan masyarakat, dan fasilitas umum lainnya. (RPJP Cagar Alam Durian Luncuk I dan II, 2016).

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung kepada hutan, begitu pula sebaliknya, hutan dapat tetap lestari bahkan rusak dengan adanya aktifitas masyarakat di dalamnya. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat lokal sekitar hutan belum juga sejahtera secara ekonomi maupun sosial. Tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya IPM (Indeks Pembangunan manusia), secara tidak langsung kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Untuk bertahan hidup, masyarakat memanfaatkan sumber daya yang terdapat di sekitar termasuk sumber daya hutan yaitu Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyatakan bahwa cagar alam dibentuk dengan

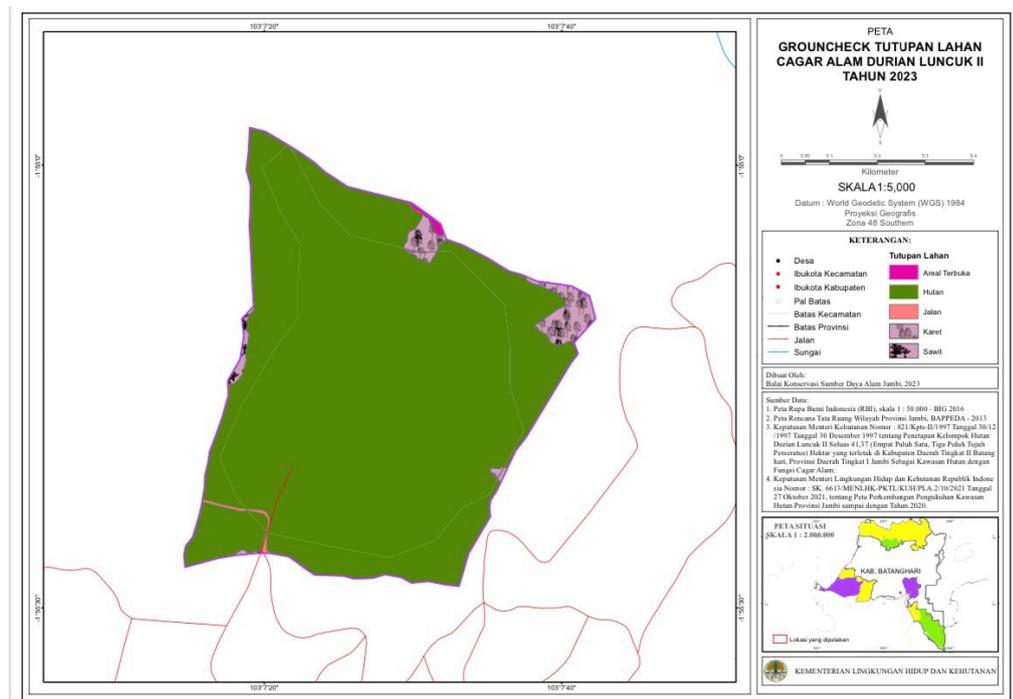
tujuan untuk melindungi ekosistem yang ada supaya keanekaragaman yang terdapat di dalamnya tetap lestari dan tidak punah, yang berarti tidak boleh ada pemanfaatan di kawasan cagar alam.

Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal seperti ini merupakan ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari peruntukan hutan tersebut.

Baik buruknya kondisi kawasan hutan terutama kondisi Cagar Alam Durian Luncuk dapat ditinjau berdasarkan syarat penutupan lahan melalui interpretasi foto citra satelit. Kondisi penutupan lahan Durian Luncuk I kurang baik karena $\pm 23,78$ ha terdapat lahan terbuka atau lahan bekas okupasi warga melalui kegiatan ilegal logging, perambahan hutan, sementara untuk kondisi penutupan lahan Durian Luncuk II relatif lebih baik karena hanya $\pm 2,15$ ha terdapat lahan terbuka (RPJP Cagar Alam Durian Luncuk I dan II, 2016). Perubahan tutupan lahan di kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II menunjukkan pergeseran signifikan dari kondisi terbuka menjadi lebih baik, dimana sekarang tutupan lahan Durian Luncuk I berdasarkan *groundcheck* lapangan pada 2023 hanya 0,88 ha lahan terbuka dan pada Cagar Alam Durian Luncuk II 0,10 ha lahan terbuka yang ditandai dengan peningkatan vegetasi dan tutupan lahan yang lebih rapat. Kondisi tutupan lahan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 dibawah ini :



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Cagar Alam Durian Luncuk I



Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Cagar Alam Durian Luncuk II

Menurut Mc Kinnon *et. al* (1993), berkata bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan yang dilindungi bergantung pada keadaan dukungan dan penghargaan yang diberikan kawasan yang dilindungi oleh warga sekitarnya. Lokasi kawasan

yang dilindungi bila dipandang sebagai penghalang bagi masyarakat, maka akan meninggalkan upaya pelestarian, namun bila dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, maka upaya pelestarian akan lebih berhasil.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menganggap perlu dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Strategi Peningkatan Keberlanjutan Masyarakat Sekitar Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I Dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat di dalam dan sekitar hutan sangat bergantung kepada hutan, begitu pula sebaliknya, hutan dapat tetap lestari bahkan rusak dengan adanya aktifitas masyarakat di dalamnya. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat lokal sekitar hutan belum juga sejahtera secara ekonomi maupun sosial. Tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya IPM (Indeks Pembangunan manusia), secara tidak langsung kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Untuk bertahan hidup, masyarakat memanfaatkan sumber daya yang terdapat di sekitar termasuk sumber daya hutan yaitu Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem menyatakan bahwa cagar alam dibentuk dengan tujuan untuk melindungi ekosistem yang ada supaya keanekaragaman yang terdapat di dalamnya tetap lestari dan tidak punah, yang berarti tidak boleh ada pemanfaatan di kawasan cagar alam.

Menurut Mc Kinnon *et al.*, (1993), berkata bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan yang dilindungi bergantung pada keadaan dukungan dan penghargaan yang diberikan kawasan yang dilindungi oleh warga sekitarnya. Lokasi kawasan yang dilindungi bila dipandang sebagai penghalang bagi masyarakat, maka akan meninggalkan upaya pelestarian, namun bila dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, maka upaya pelestarian akan lebih berhasil.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi?
3. Strategi apa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi
3. Menganalisis strategi peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan cagar alam durian luncuk I dan cagar alam durian luncuk II Provinsi Jambi
2. Memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga masyarakat di sekitar kawasan cagar alam durian luncuk I dan cagar alam durian luncuk II Provinsi Jambi
3. Memberikan informasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan Cagar Alam Durian Luncuk II Provinsi Jambi
4. Bagi para peneliti lain dan pihak yang membutuhkan dapat digunakan sebagai pembanding, bahan informasi, dan referensi.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi pada permasalahan agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat sekitar kawasan Cagar Alam durian Luncuk I (Desa Guruh Baru) dan Cagar Alam Durian Luncuk II (Desa Jangga Baru) Provinsi Jambi dan pada analisis strategi peningkatan kesejahteraan difokuskan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari.
2. Penelitian ini menggunakan sampel rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan cagar alam dengan teknik sampling *simple random sampling* sebanyak 53 responden di Desa Guruh Baru dan 58 responden di Desa Jangga Baru dan untuk analisis strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan teknik sampling *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 21 responden.
3. Penelitian ini difokuskan pada tujuh variabel utama yaitu : tingkat kesejahteraan masyarakat (diukur berdasarkan pendapatan rumah tangga). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga luas lahan perkebunan, jumlah tenaga kerja produktif, jumlah bantuan dari pemberdayaan masyarakat, frekuensi masyarakat mendapatkan pelatihan/penyuluhan dari BKSDA pertahun, jumlah tanggungan keluarga serta lama pendidikan formal.
4. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara untuk mengumpulkan data primer serta analisis data sekunder dari sumber yang relevan.